



PROSIDING

# Konferensi Nasional Komunikasi

## Peran Bahasa dan Identitas Kultural (Studi Kasus Warga Masyarakat Tionghoa di Perkumpulan Masyarakat Surakarta)

Lukas Maserona Sarungu<sup>1</sup>, Pawito, Sri Hastjarjo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret  
Jl. Ir. Sutami 36 A, Ketingan, Jebres, Surakarta, 57126, Indonesia

[ronnysarungu@gmail.com](mailto:ronnysarungu@gmail.com), [bungpawito@gmail.com](mailto:bungpawito@gmail.com), [sri.hastjarjo@gmail.com](mailto:sri.hastjarjo@gmail.com)

---

### Abstract

Language is a Manifestation of identities. This study aim to seek cultural identity of Chinese community in Perkumpulan Masyarakat Surakarta through their use of language. Communication approach used is from John Fiske, and theoretical lens used to understand data is derived from Stuart Hall concept of cultural identity. This study use case study in order to obtain data and analysis. Our finding suggest that Chinese communities in Perkumpulan Masyarakat Surakarta did not used Mandarin nor English to express themselves, instead they used Bahasa Indonesia and Javanese Language to interact socially. This Study suggest that Chinese Community of PMS had Indonesian-Javanese Cultural Identity.

Keywords: Cultural Identity, Communication, Language, Perkumpulan Masyarakat Surakarta, Case Study

### Abstrak

Bahasa adalah manifestasi identitas. Kajian ini mencoba melihat bagaimana identitas kultural komunitas Tionghoa di Perkumpulan Masyarakat Surakarta melalui bahasa yang digunakan oleh komunitas tersebut. Perspektif teoretis yang digunakan adalah perspektif komunikasi dari John Fiske, sedang konsep identitas kultural yang dipakai untuk mendeskripsikan data adalah konsep identitas kultural dari Stuart Hall. Metode studi kasus digunakan untuk mendapatkan data dan jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah. Hasil menunjukkan bahwa dalam berbahasa tidak ditemui pemakaian Bahasa Barat, maupun Mandarin, Bahasa Indonesia mendominasi dalam konteks formal, sedangkan Bahasa Jawa mendominasi situasi informal. Kesimpulan dari kajian ini: dari bahasa yang digunakan maka identitas kultural komunitas Tionghoa PMS adalah Indonesia-Jawa.

Kata kunci: Identitas Kultural, Komunikasi, Bahasa, Perkumpulan Masyarakat Surakarta, Studi Kasus

**Copyright © 2017 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved**

---

### Pendahuluan

Globalisasi. Sebagian sarjana berpendapat bahwa globalisasi merupakan imperialisme budaya, yang mengakibatkan terjadinya pembaratan (homogenisasi budaya barat/*westernisasi*) pada skala global (Schiller, 1985; Robins, 1991 dalam Barker, 2002). Salah satu sarjana yang telah menelaah proses dan dampak pembaratan di Indonesia secara sistematis adalah Denys Lombard (2005). Lombard, dalam karya besarnya yang selesai tahun 1989, “Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan (Jilid 1)”, memaparkan secara sistematis pembaratan yang terjadi di pulau Jawa. Rumusan masalah penelitian Lombard ketika itu adalah: Bagaimanakah reaksi masyarakat yang terkena dampak pembaratan?

Dan bagaimanakah masyarakat-masyarakat itu beradaptasi dan bertahan? (43-44). Jawaban Lombard, pada saat itu menitikberatkan pada apa yang disebutnya sebagai “golongan-golongan yang terpengaruh pembaratan”, yaitu komunitas Kristen, para priyayi, tentara, serta dunia universitas dan kelas sosial-menengah yang berangsur tumbuh di Jawa (xviii).

Kajian Lombard diatas kemudian menyisakan pertanyaan, bagaimana dengan golongan atau komunitas Tionghoa? Bukankah mereka juga diterpa pengaruh pembaratan yang menurut Lombard (2005) sudah berlangsung sejak sebelum kekuatan kolonial hadir di Pulau Jawa? Lombard tidak menjelaskan lebih lanjut apakah komunitas Tionghoa dianggap masuk ke dalam salah satu golongan yang terpengaruh

pembaratan di atas atau tidak. Namun yang pasti, sama seperti komunitas lain di Pulau Jawa, komunitas Tionghoa di Jawa juga diterpa oleh pengaruh budaya barat (Rush, 2007).

Itulah salah satu alasan kenapa diperlukan kajian lanjutan mengenai dampak globalisasi terhadap minoritas Tionghoa. Selain itu, ada alasan lain yang membuat kajian lanjutan terhadap temuan Lombard penting untuk dilakukan, yaitu perubahan konteks yang telah terbentang selama dua dekade lebih. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah komunitas Tionghoa dalam menyikapi pembaratan yang diakibatkan globalisasi juga sama seperti hasil kajian Lombard terhadap masyarakat di Pulau Jawa secara umum? Hasil kajiannya saat itu mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat Jawa memilih mentalitas barat dan sebagian lain memilih kembali ke sumber-sumber ketimuran/tradisi (Lombard, 2005). Kajian ini akan mengungkap bagaimana komunitas Tionghoa bersikap terhadap pembaratan yang dibawa oleh globalisasi ke dalam kehidupan mereka, apakah jawabannya akan sama dengan temuan Lombard terhadap masyarakat Pulau Jawa secara umum? Atau ada jawaban lain? Dan mengapa hal tersebut terjadi?.

Pada konteks penelitian ini, yang akan dikaji adalah simbol-simbol identitas kultural, mengikuti lacakan Lombard (2005, 156), yaitu pada bahasa. Alasan pemilihan simbol-simbol yang dikaji tersebut menggunakan argumen Lombard yaitu, pengaruh terhadap simbol-simbol tersebut walaupun “...*samar dan sering luput dari perhatian pengamat yang tergesa-gesa dan menganggap kesamaan sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya.*” (Lombard, 156). Namun, masih menurut Lombard, pengaruh dalam simbol diatas lebih mengena dan lebih berarti terhadap identitas daripada pengaruh-pengaruh yang terdapat pada tataran pranata.

Penelitian ini berfokus pada simbol-simbol bahasa yang diperlihatkan oleh komunitas Tionghoa. Komunitas Tionghoa Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) diambil sebagai unit analisa penelitian ini. Komunitas ini diambil karena memenuhi kriteria *typical case studies* yang dikemukakan Creswell (2007). Komunitas PMS ini dipilih karena diasumsikan tipikal (sejalan) dengan teoretisasi Lombard (2005) yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Syarat tipikalisasi yang dimaksud adalah a). berada di pulau Jawa, b). berada di

daerah yang relatif terbuka terhadap globalisasi, c).berusia cukup panjang hingga bisa dianggap sebagai entitas yang khas daripada komunitas Tionghoa yang lain. PMS merupakan sampling tipikal yang ideal karena telah berusia hampir seabad, berada tidak hanya di Pulau Jawa namun juga lahir dan tumbuh di kota Solo yang sejak awal abad telah menjadi metropolis kolonial Belanda yang dilanda pembaratan lebih dini dibanding daerah lain di Pulau Jawa menjadikannya entitas yang ideal untuk riset ini (Kuntowijoyo, 2000).

Dari paparan di atas, terlihat bahwa permasalahan identitas kultural etnis Keturunan Tionghoa PMS yang saat ini sedang menghadapi ujian dari pengaruh globalisasi menarik untuk diangkat menjadi topik riset. Terutama, bagaimana identitas kultural etnis Tionghoa PMS, yang tampak dari cara berbahasa di era global ini? Dari pertanyaan tersebut perumusan masalah penelitian ini bermula. Detil rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana identitas kultural warga Indonesia-Tionghoa di Perkumpulan Masyarakat Surakarta ditinjau dari bahasa yang digunakan?

Komunikasi adalah interaksi sosial melalui pesan (Fiske, 2012). Karena yang jadi fokus penelitian ini adalah lacakan pesan maka perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai pesan. Pesan menjadi fokus lacakan penelitian ini karena pesan merupakan manifestasi identitas kultural sehingga untuk melacak konstruksi identitas kultural suatu komunitas maka dimulai dari pesan yang ada di komunitas tersebut (Lihat Hecht, 2003). Penjelasan mengenai arti pesan (konstruksi simbolis) bisa didapat dari Geertz, pesan komunikasi antar manusia bisa dipandang berupa tindakan atau serangkaian tindakan simbolis (bandingkan dengan Langer dalam Littlejohn, 2008). Pengertian komunikasi ini berjaln dengan definisi tentang kebudayaan yang diajukan Geertz (1973). Dalam bukunya *Cultural Interpretation* Geertz mengajukan definisi budaya adalah tindakan simbolis atau serangkaian tindakan simbolis. Jadi bisa disimpulkan komunikasi adalah *interaksi sosial melalui serangkaian tindakan simbolis atau praktik-praktik budaya*. Apabila komunikasi bisa dikatakan hampir identik dengan budaya, maka bagaimana hubungan komunikasi dengan identitas budaya?

Penjelasan Geertz dan Fiske tidak dapat membantu kita memahami topik identitas budaya, walaupun definisi kerja mereka sangat berguna dalam memahami kaitan komunikasi

dan kebudayaan. Untuk itu kita akan melihat pada karya Hall (1990). Dalam tulisannya *Cultural Identity and Diaspora*, Hall menyarankan agar kita memandang identitas sebagai suatu proses produksi yang tak pernah selesai dan selalu dibangun didalam representasi. Saran Hall ini membuka ruang diskusi tentang identitas kultural dan representasi, atau dengan kata lain identitas kultural dan komunikasi.

Dapat kita jelaskan dari pendapat Hall tersurat dua hal yang bisa kita amati, yaitu 1). Proses produksi identitas yang tak pernah selesai dan 2). Identitas dibangun dalam representasi atau balutan tanda-tanda budaya komunitas tersebut. Ad 1). Penjelasan proses produksi identitas yang tak pernah selesai dilandasi pandangan Hall bahwa identitas kultural merupakan *points of identification* yang *unstable* dan selalu berada dalam wacana sejarah dan kebudayaan (Hall, 1990). Poin identifikasi yang tidak stabil ini selalu memiliki konteks sejarah dan budaya, tidak muncul dari ruang hampa. Memiliki masa lalu dan disebut tidak stabil karena selalu mengalami perubahan. Lebih lanjut, poin identifikasi atau identitas adalah label yang diberikan pada beragam cara kita diposisikan atau memposisikan (*positioning*) diri dalam narasi masa lalu (Hall, 1990).

Ad 2). Telah dikatakan bahwa identitas kultural dibangun dalam representasi. Penjelasan ini kita dapat dari Carey (2009) menurut Carey walaupun hal-hal material secara obyektif ada di luar manusia, namun kesemuanya itu hanya menjadi realita bagi pikiran manusia melalui representasi simbol. Tanpa simbol tidak ada realitas. Jadi jelaslah bahwa representasi memproduksi eksistensi suatu obyek material. Hal serupa berlaku bagi identitas kultural. Dimana eksistensi identitas kultural individu atau komunitas dibangun melalui realitas simbolis (21). Singkatnya, Identitas kultural adalah *positioning* simbolis yang digunakan oleh komunitas. Dalam konteks penelitian ini simbol yang dikaji adalah *bahasa*.

Hall (1990) menjelaskan bahwa identitas kultural selalu berada dalam narasi masa lalu. Narasi masa lalu yang dimaksud Hall adalah representasi sejarah dan budaya masa lampau. Representasi tersebut turut membentuk identitas kultural dengan menjadi referensi komunitas yang berupa memori kolektif, fantasi, narasi dan bahkan mitos. Dari penjelasan diatas bisa ditarik pengertian bahwa dalam representasi sejarah dan

budaya masa lalu, identitas kultural (*positioning* simbolis) kita di masa kini dibentuk.

Masih menurut Hall, *positioning* ini mengandung masalah karena merupakan perpaduan dari kesinambungan dan keterpisahan, kelanjutan dan gejolak. Diantara dua tegangan inilah identitas kultural komunitas diproduksi, direproduksi dan dirubah. *Positioning* bernama identitas kultural ini agak pelik untuk dipahami dan sulit dilihat sebagai objek studi komunikasi. Namun, sebagaimana yang dikatakan Carey (2009) dimana ada proses interaksi sosial yang melibatkan penciptaan, pemaknaan dan penggunaan pesan simbolis dalam jumlah signifikan maka kajian komunikasi layak untuk mencoba menjawab permasalahan yang timbul dari interaksi tersebut. Disinilah link antara identitas kultural dan penelitian komunikasi.

Sejak awal rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana potret manifestasi identitas kultural warga Tionghoa PMS Surakarta dilihat dari komunikasi simbolis (bahasa) yang digunakan sehari-hari? Fragmen tersebut akan diuraikan melalui elemen-elemen komunikasi yang didefinisikan oleh Fiske (2012). Yaitu elemen komunikator/kan, kemudian elemen pesan (simbol-simbol bahasa), elemen referensi (narasi dan memori), dan terakhir elemen makna. Pemahaman akan keempat elemen komunikasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan pengertian tentang identitas kultural kontemporer komunitas Tionghoa PMS. Elemen komunikator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunitas Tionghoa PMS Surakarta. Elemen pesan adalah komunikasi simbolis (bahasa) yang digunakan sehari-hari oleh komunitas Tionghoa PMS. Elemen komunikasi ketiga yang ada di model komunikasi Fiske (2012) adalah elemen referensi. Elemen ini dijelaskan oleh Hall (1990) terdiri dari tiga (3) hal, yaitu: elemen memori, elemen narasi, dan elemen fantasi. Elemen memori terkait ingatan kolektif yang dimiliki oleh komunitas PMS. Elemen narasi merupakan kisah “ideologis” yang menjadi acuan kolektif komunitas PMS. Elemen fantasi berupa impian kolektif komunitas PMS tidak didapatkan dari data selama wawancara sehingga tidak dimasukkan kedalam pembahasan.

Pada latar belakang telah disebutkan isi tesis Lombard (2005a), mengenai mentalitas (Lombard menggunakan istilah ini ketimbang identitas) masyarakat di Pulau Jawa yang terkena pembaratan. Menurutnya, hasil

mentalitas pembaratan terhadap masyarakat di Pulau Jawa tersebut dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama (1), ada golongan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan dimana pembaratan meninggalkan dampak yang cukup jelas. Dan kedua (2), di bidang lain ada juga gejala jelas kembali ke sumber-sumber ketimuran (xviii-xix). Dengan kata lain sebagian masyarakat memilih mentalitas barat, sedang sebagian masyarakat yang lain memilih untuk kembali kepada sumber-sumber ketimuran.

Tesis Lombard ini nanti akan dijadikan panduan untuk membahas dan mendiskusikan temuan penelitian. Namun untuk lebih memperkaya diskusi dan pembahasan, turut dibahas tesis beberapa sarjana lain mengenai identitas diaspora Tionghoa. Heryanto & Mandal (2003) menyatakan Kecinaan merupakan stempel penguasa Orde Baru atau “*It was socially fabricated.*” Dalam bukunya yang lain, *State Terrorism* (Heryanto, 2006) diungkapkan bahwa negara memanipulasi politisasi identitas untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan rezim Orde Baru. Dengan kata lain identitas Tionghoa di Indonesia diposisikan (bukan memosisikan diri) oleh rezim untuk keperluan pemeliharaan kekuasaan.

Pendapat di atas memperlihatkan bahwa politik identitas digunakan oleh rezim demi keberlangsungan dirinya dan posisi diaspora Tionghoa sangat lemah terhadap rezim. Namun, hal itu adalah ketika rezim Orde Baru berkuasa (1966-1998). Sedangkan konteks penelitian ini ada pada masa paska Orde Baru, pertanyaannya adalah bagaimana identitas diaspora Tionghoa Indonesia pada masa paska Orde Baru?

Untuk memahami penyebab posisi orientasi identitas (*positioning*) kultural orang Tionghoa PMS dalam penelitian ini, maka digunakan penjelasan yang diajukan Ong (2009). Pada pertengahan abad 20, Ong menulis bahwa ada 3 (tiga) budaya besar yang mempengaruhi Tionghoa Peranakan di Indonesia, yaitu budaya Barat, budaya Jawa, dan budaya Tionghoa. Ketiga narasi besar yang diungkapkan Ong inilah yang akan digunakan untuk memahami pilihan identitas kultural orang Tionghoa PMS.

Di lain pihak, pandangan Hoon (2012) mengenai politik asimilasi rezim Orde Baru akan digunakan untuk menjelaskan elemen memori kolektif. Karena bagaimana pun juga, pengaruh dari posisi ke-Tionghoa-an yang dinarasikan oleh rezim Orde Baru tampaknya

masih sangat terasa bagi subyek penelitian, walau pun rezim tersebut telah berakhir hampir dua dekade lalu. Jadi relevansi pendapat Hoon masih terasa hingga kini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perkumpulan Masyarakat Surakarta, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Periode pelaksanaan dimulai sekitar Desember 2012 sampai Februari 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus *single instrumental* (Creswell, 2007: 74).

Sumber data primer adalah hasil wawancara (Creswell, 2007: 130) dengan orang Tionghoa yang tergabung dalam Komunitas Perkumpulan Masyarakat Surakarta dan mereka yang kompeten mengenai seluk-beluk PMS yang bersedia menjadi narasumber penelitian ini. Sumber data sekunder adalah studi dokumen. Sebagai konsekuensi penggunaan metode studi kasus maka teknik pengambilan sampel bersifat purposive.

Strategi sampling yang digunakan adalah *convenience case* (Creswell, 2007: 127). Hal ini disebabkan peneliti adalah orang dari luar PMS, sehingga sangat bergantung pada kesediaan dan kesukarelaan masing-masing narasumber. Implikasinya adalah selain kriteria anggota PMS tidak ada kriteria khusus lain dalam menentukan narasumber. Sedangkan karakteristik narasumber yang telah diwawancara semuanya berjenis kelamin pria dan berumur antara 20 – 60 tahun.

Penelitian ini menggunakan strategi validasi data yang diusulkan oleh Creswell (2007: 207-208), yaitu triangulasi data dan *peer review*.

### **Hasil Penelitian**

Pluralitas dan Pluralisme yang berkembang setelah Indonesia merdeka ternyata dianggap ancaman terhadap pembangunan dan keamanan bangsa. Karena itu, pada masa Orde Baru keberagaman suku, agama, ras dan golongan di Indonesia dianggap membahayakan keamanan dan pembangunan ekonomi bangsa (Hoon, 2012). Maka keberagaman ditekan dan semua warga negara Indonesia di doktrin bahwa mereka semua berada dalam bingkai ideologi nasional Pancasila yang dikonstruksi secara homogen oleh pemerintahan Orde Baru (Hoon, 2012).

Konstruksi homogen pemerintah Orde Baru ini menganggap orang Tionghoa sebagai orang non-pribumi, dan dominasi orang Tionghoa dalam perekonomian bangsa sebagai suatu

masalah (Hoon,2012). Pemerintah Orde Baru mencoba mengatasi masalah tersebut dengan membuat program pembauran yang didukung oleh militer (Hoon, 2012), program tersebut lebih dikenal dengan sebutan asimilasi.

Naiknya rezim orde baru ke tampuk kekuasaan membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) tersingkir atau tertindas. Salah satunya adalah perdebatan antara Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang mengusung konsep asimilasi dengan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang mengusung konsep integrasi. Perdebatan ini berakir dengan kemenangan LPKB. Kemenangan ini disebabkan karena Baperki lebih dekat dengan Kaum Komunis sedangkan LPKB dekat dengan Angkatan Darat. Naiknya Orde Baru pasca 1965 yang didominasi oleh Angkatan Darat dan kaum anti komunis segera saja membubarkan Baperki yang terlalu dekat dengan PKI. Walau pun tidak lama kemudian LPKB juga dibubarkan tetapi kebijakan asimilasi yang diusungnya dipakai sebagai kebijakan resmi pemerintah Orde Baru untuk diterapkan terhadap minoritas Tionghoa. Lembaga yang kemudian dibentuk khusus oleh pemerintah untuk itu adalah Bakom PKB (PMS, 1982).

Dukungan PMS terhadap asimilasi sebenarnya telah terlihat sejak tahun 1959 (PMS, 1982). Organisasi yang berdiri pada tahun 1932 dengan nama Chuan Ming Kung Hui ini merubah namanya menjadi Perkumpulan Masyarakat Surakarta pada tahun 1959. Semangat asimilasi sangat terasa dalam perubahan nama ini seperti yang dijelaskan dalam buku 50 tahun PMS, yaitu “adanya kegairahan asimilasi dan peleburan dalam tubuh organisasi itu sendiri, antar anggota dan masyarakat keturunan Tionghoa. Serta tampil dan masuknya saudara-saudara kita Pribumi ke dalam CMKH (PMS, 1982).”

Kutipan diatas menunjukkan bahwa PMS sudah sejak lama Pro-asimilasi. Namun, selama ini PMS belum terlibat secara langsung dalam politik pemerintah Orde Baru. Keterlibatan PMS dalam politik asimilasi pemerintah Orde Baru diawali ketika diadakan pembentukan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) Cabang Surakarta oleh Walikota Surakarta dengan Skep no. 137/DR/X/65 bertanggal 20 Desember 1965. Pengurus yang terdiri atas wakil-wakil golongan etnis Tionghoa, Pribumi dan pemerintah, golongan etnis Tionghoa diwakili oleh ketua

PMS saat itu Wignyo Saputro/Kwik Dhiam Hwat (Rustopo, 2007).

PMS pun ikut dalam kegiatan pemerintah yang disponsori LPKB dan mendukung asimilasi, contohnya malam asimilasi safari yang diadakan oleh Golkar. Karena dukungan PMS terhadap kebijakan asimilasi dan kedekatan PMS dengan Golkar, maka PMS menjadi satu-satunya organisasi sosial kemasyarakatan Tionghoa yang diperbolehkan hidup dan berkembang selama masa rezim Orde Baru (Rustopo, 2007).

Keberpihakan PMS ini, menurut Rustopo (2007) dapat dipahami, karena Golkar merupakan partai pemerintah yang berkuasa saat itu, yang diharapkan bisa melindungi keberadaan PMS dan WNI Keturunan Tionghoa (Rustopo, 2007). Asimilasi sebagai pilihan strategi survival komunitas PMS sedikit banyak mempengaruhi konstruksi identitas budaya komunitas PMS. Karena, sebagaimana yang diungkapkan Hoon (2012), program asimilasi ini juga menuntut penghapusan secara total segala tanda dan penanda ketionghoan yang merupakan identitas kultural kaum Tionghoa-Indonesia.

Beragamnya dialek Bahasa Tionghoa membuat sesama orang Tionghoa sendiri kesulitan untuk berbicara satu sama lain karena perbedaan ini, untuk menjembatani keragaman dialek tersebut biasanya antar Orang Tionghoa menggunakan tulisan untuk mencapai kesepahaman (Gondomono, 2013). Agar memudahkan komunikasi di seluruh negeri Tionghoa maka pada tahun 1955 diresmikan bahasa Putonghua (mandarin) dan 1958 disempurnakan Pin Yin yang berupa romanisasi resmi bahasa Putonghua (Gondomono, 2013).

Bahasa yang digunakan oleh orang Tionghoa di Indonesia sendiri mengalami pasang-surut seiring dengan perkembangan kondisi sosial-politik. Lan (2013) mencatat bahwa di Indonesia pada tahun 60-an, orang Tionghoa, pada umumnya menggunakan Bahasa Indonesia untuk berbicara satu sama lain, baik dari golongan Hokkian, Hakka atau Kongfu. Kebanyakan sudah tidak menguasai Bahasa Tionghoa lagi dan lebih menguasai bahasa daerah setempat sebagai bahasa pergaulan (Lan, 2013).

Ada yang menarik dari catatan Lan (2013), diungkapkan kondisi ini semuanya akan berubah, karena ada kenyataan bahwa semua sekolah Tionghoa di Indonesia mengajar dengan Bahasa Resmi (Kuo-Yu) untuk berbicara dengan

orang Tionghoa dari mana pun. Bahasa Mandarin diharapkan sebagai *lingua franca* untuk berbicara dengan Orang Tionghoa dari berbagai daerah di Indonesia. Prediksi yang diterbitkan tahun 1961 ini tentu saja tidak terjadi karena peristiwa politik G30S/PKI yang membawa perubahan mendasar dan mendalam pada kehidupan komunikasi simbolik Orang Indonesia-Tionghoa.

Pasca peristiwa politik Gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut G30S/PKI terjadi pergolakan rezim yang menyeret nasib orang Indonesia-Tionghoa, karena dicurigai oleh penguasa sebagai pendukung Komunisme dan diragukan nasionalismenya terhadap Indonesia (Heryanto, 2015). Akibat pertarungan ideologis pada skala global ini, pemerintah Indonesia yang mengkhawatirkan eksekusi dari salah satu Partai Komunis terkuat di dunia (Partai Komunis China) membuat peraturan-peraturan yang secara sistematis mendiskriminasi orang "Tionghoa" yang ada di Indonesia. Keputusan-keputusan politik pemerintah Orde Baru yang mendiskriminasi Orang Tionghoa mengakibatkan hilang dan berhentinya pewarisan komunikasi simbolik tradisional Tionghoa di komunitas Tionghoa PMS. Tidak hanya PMS namun juga etnis Tionghoa secara nasional.

Peraturan-peraturan pemerintah Orde Baru yang diskriminatif menyebabkan prediksi Lan (2013) tidak terjadi. Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan larangan pengajaran Bahasa Mandarin. Bisa dibayangkan Bahasa Mandarin tidak pernah diajarkan lagi sehingga hampir tidak ada lagi pewarisan Bahasa Mandarin di Indonesia (Narasumber 3, 2014). Untuk di Solo, pengajaran Bahasa Mandarin hanya berlangsung sampai tahun 1978 (Narasumber 3, 2014). Untuk media massa hanya ada satu koran berbahasa Mandarin yang diperbolehkan terbit oleh pemerintah dan dikelola oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu *Harian Indonesia*. Koran ini ditujukan kepada pembaca yang hanya bisa berbahasa Mandarin dan masih kesulitan berbahasa Indonesia.

Kondisi hilangnya simbol-simbol komunikasi Bahasa Mandarin di Indonesia mulai berubah semenjak jatuhnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Setelah Presiden Suharto turun dari kekuasaannya, mulai muncul narasi identitas selain yang diajarkan oleh rezim Orde Baru, termasuk narasi Tionghoa. Presiden Habibie mulai melonggarkan aturan-aturan diskriminatif

tersebut terutama masalah SBKRI. Dilanjutkan oleh Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati yang mencabut semua peraturan diskriminatif atas warga Indonesia-Tionghoa. Puncak penghapusan diskriminasi negara terjadi pada tahun 2006, seiring disahkannya UU Kewarganegaraan yang hanya memisahkan kewarganegaraan menjadi Warga negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) saja.

Semenjak UU ini disahkan, identitas budaya Tionghoa secara berangsur mulai tampil kembali dalam kehidupan publik, Narasumber 1 (2013). Berangsur diakuinya kebudayaan Tionghoa dan kemunculan seni tradisi Tionghoa di ruang publik, membuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Tionghoa yang tadinya hampir tidak ada muncul kembali seiring dengan apresiasi yang meningkat dari komunitas Tionghoa dan publik umum. Di bawah pemerintahan Gus Dur, etnis Tionghoa memperoleh kebebasan yang lebih besar untuk mengekspresikan identitas kultural dan kepercayaan mereka. Gus Dur menjamin etnis Tionghoa berhak menjalankan praktik-praktik budaya mereka, sama dengan hak yang telah dimiliki kelompok-kelompok etnis lain. Hasil amandemen kebijakan kultural resmi yang diskriminatif tadi, untuk pertama kalinya selama lebih dari tiga dasawarsa, akhirnya etnis Tionghoa bisa menikmati kebebasan merayakan Imlek secara publik tanpa ada kekangan (Hoon, 2012)

Kondisi dan situasi diskriminatif yang kemudian dilanjutkan dengan era keterbukaan semacam itulah yang mempengaruhi penggunaan dan pewarisan bahasa orang Indonesia-Tionghoa saat ini. Karena itu pengambilan data ke komunitas PMS diperlukan untuk mendapatkan potret bagaimana sesungguhnya kondisi identitas kultural Tionghoa-Indonesia, terutama dalam hal simbol-simbol bahasa di komunitas PMS saat ini. Beberapa hal agak mengejutkan peneliti, karena tidak seperti dugaan yang didapat dari literatur yang sudah dibaca sebelumnya.

Selama pengambilan data ke lokasi PMS, banyak hal menarik yang ditemui, antara lain hampir tidak ada kata/kalimat Bahasa Mandarin terucap baik dalam konteks percakapan informal maupun formal.

Sebenarnya hal ini di luar dugaan peneliti, ketika peneliti sedikit sekali menemui kalimat/kata Mandarin selama mengambil data di PMS, mendengar komunitas PMS berbincang antar-mereka pun hampir sama sekali tidak

menggunakan bahasa Mandarin, kecuali ketika menyebutkan angka. Hal ini mengherankan, karena beberapa literatur dan wawancara dengan akademisi yang dilakukan peneliti kesemuanya menyimpulkan ada kebangkitan narasi Tionghoa seiring dengan kebangkitan negara RRC di pentas global (Narasumber 3, 2014; Ang, 2001; Jacques, 2009).

Narasumber 3 (2014) dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa ada usaha-usaha untuk kembali mempelajari dan mengajarkan Bahasa Mandarin sejak jaman Presiden Habibie. Ketika itu, Narasumber 3 juga turut mendirikan program studi Diploma-III Bahasa China di UNS, salah satu program studi yang pertama di Universitas Negeri di Indonesia semenjak pelarangan penggunaan dan pengajaran Bahasa Mandarin oleh rezim Orde Baru. Ang (2001), dalam bukunya mengemukakan bahwa ada semangat untuk kembali mempelajari Bahasa Mandarin (bagian dari re-sinization) di berbagai Negara Asia Tenggara seiring dengan meningkatnya prestise RRC sebagai Negara yang pesat pertumbuhan ekonominya.

Karena itu agak mengherankan bahwa setelah 13 (tiga belas) tahun semenjak usaha-usaha pengajaran Bahasa Mandarin dimulai oleh Presiden Habibie dan salah satunya dimulai dari pembukaan Prodi Bahasa Mandarin di UNS, kota dimana PMS berada, dan 11 (sebelas) tahun setelah Ang (2001) mengemukakan tentang kebangkitan pendidikan dan pengajaran Bahasa Cina di berbagai Negara di Asia Tenggara. Ternyata nyaris tidak ditemui gairah yang sama di komunitas PMS. Sejauh ini kebangkitan penggunaan Bahasa Mandarin belum terlihat di komunitas PMS.

Namun, pelestarian bahasa tidak menjadi fokus pelestarian PMS, karena sudah ada organisasi lain yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa mandarin (Narasumber 1, 2013). Memang PMS tidak memiliki forum khusus untuk pelestarian bahasa, namun kekuatiran mengenai tergerusnya bahasa leluhur sebenarnya sangat dirasakan oleh PMS (Narasumber 1, 2013).

Usaha-usaha perluasan penggunaan Bahasa Mandarin baru dimulai sekitar tahun 2000. Ketika hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dipulihkan (Narasumber 3, 2014) dan Bahasa Mandarin mulai diberi ijin untuk diajarkan di sekolah maupun kursus. Saat ini, seiring dengan naiknya prestis RRC sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia

dan calon superpower masa depan, perkembangan kursus dan pengajaran Bahasa Mandarin, sebagaimana tren global, juga tampaknya semakin tidak terbelenggu di Indonesia karena semakin tingginya minat belajar dari masyarakat terhadap kemajuan dan kesuksesan negara Tiongkok.

### **Penggunaan Bahasa Jawa**

Awalnya peneliti mendapati Bahasa Jawa tidak mendominasi percakapan antara peneliti dengan komunitas PMS, misal kalimat-kalimat Narasumber 1 (2013), “Ya wong cuma organisasi-organisasi sosial” “Aku saiki malah, batik pun tak bikin Chong Sam” “Karena aku kepengen bahwa, lhoh, akulturasi budaya ini khalus luar biasa” “Cuma aku sudah gak sembahyangan” (cetak tebal - penekanan oleh peneliti). Hanya ada beberapa kata-kata Bahasa Jawa yang terselip selama wawancara dilakukan, dan sama sekali tidak mendominasi percakapan. Bahasa Indonesia lebih mendominasi selama wawancara berlangsung.

Namun ketika peneliti menjumpai komunitas PMS yang sedang bercakap-cakap di depan GOR PMS (seberang kantor PMS), ternyata mereka berbincang dengan Bahasa Jawa. Hal ini tampaknya terjadi bila situasinya sudah akrab atau informal. Kalimat-kalimat seperti (Narasumber 7, 2013), “Arep neng ndi Yu?” “Ketoke wong e ra ono.” “Wingi aku ketemu.” “Lha piye, saiki wong e ra tau ngethok?” mengalir lancar diantara anggota komunitas PMS yang berbincang. Dugaan ini menguat setelah peneliti mencoba berbincang dengan mereka dan mereka menggunakan Bahasa Indonesia ketika berbincang dengan peneliti. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di poin di bawah ini.

Pada saat peneliti menggali data di situs penelitian, komunitas PMS yang ditemui cenderung menggunakan Bahasa Indonesia, seperti wawancara dengan Narasumber 1 (2013), “Jadi terus terang memang kita tidak mau bertumbukan, istilahnya pelayanan...” Penggunaan Bahasa Indonesia juga mendominasi situasi antara peneliti dengan staf PMS, seperti pertemuan dengan Narasumber 5 (2013), “Mau kemana Pak?” “Kalo mau ke kantor PMS, keluar dulu, belok kanan, ketemu gang belok kanan, nanti perempatan pertama belok kanan, nah kantor PMS di kanan jalan.” Peneliti mendapat kesan bahwa Bahasa Indonesia mendominasi situasi formal ketika seiring bertambahnya data, seperti kalimat-

kalimat yang diungkapkan Narasumber 4 (2013), “Tunggu sebentar ya, Pak “R” -nya belum datang.” “Kalau untuk bulletin PMS kita ada, tunggu sebentar biar diambilkan.” Bahasa Jawa lebih mendominasi percakapan dengan konteks informal.

Dugaan peneliti bahwa Bahasa Indonesia mendominasi percakapan formal terbukti ketika peneliti mencoba bergabung dengan komunitas PMS yang sedang berbincang santai di depan GOR PMS, terletak di depan kantor PMS. Penggunaan Bahasa Indonesia mendominasi percakapan. Seperti yang dikemukakan oleh seorang Bapak di pelataran PMS (Reponden 8, 2013), “Dari mana Pak? UNS? Mau ketemu Pak R ya? Ditunggu disini saja nanti kalau datang mobilnya parkir di depan sini kok, jadi tahu kalau sudah datang.”

### **Kata (simbol) Barat**

Data yang menyangkut penggunaan bahasa Barat hampir tidak ada. Hanya ada satu kata Barat yang terdeteksi yaitu Google (Narasumber 1, 2013), yang merupakan mesin pencari untuk menjelajahi Internet dan merupakan produk Amerika (Barat). Kata ini pun hanya terdeteksi oleh Narasumber 1 selama wawancara berlangsung. Sedangkan ketika peneliti mencoba berbincang dan menggali data lebih lanjut dengan anggota komunitas PMS yang lain, sama sekali tidak terdeteksi kata/kalimat Barat yang lain. Hal ini agak mengejutkan karena diluar dugaan peneliti, bahwa globalisasi yang begitu masif dan sangat ditakutkan akan menggerus dan menggantikan tradisi lokal (Narasumber 1, 2013; Narasumber 2, 2014) ternyata tidak terjadi. Paling tidak, dalam hal berbahasa sehari-hari di lingkungan komunitas PMS perbatasan tidak perlu dikhawatirkan.

Bahasa yang digunakan di atas akan dilihat dari sudut pandang teoretik yang digunakan oleh Ong (2009) dan deskripsi Lombard (2005) mengenai pengaruh perbatasan di Pulau Jawa. Hal ini dilakukan untuk memahami, sebagaimana dikemukakan Geertz (1973) dan Hall (1990) tentang kultur, yaitu web of significance atau referensi yang mempengaruhi identitas kultural komunitas PMS di masa kini.

Pada paruh pertama abad 20 Sejarawan Ong Hok Ham sudah mendeskripsikan tiga (3) narasi yang mempengaruhi orang Tionghoa di Pulau Jawa. Yaitu, narasi Jawa, Tionghoa, dan Barat. Narasi Barat terlihat dari penggunaan Bahasa Belanda dalam percakapan sehari-hari, begitu

pula narasi Jawa terlihat dari penggunaan Bahasa Jawa dan juga Narasi Tionghoa terlihat dari penggunaan bahasa Mandarin, semuanya masih umum digunakan pada masa Ong menuliskan risalahnya.

Apabila merujuk pada data penelitian ini, maka jelas sekali bahwa dari narasi Tionghoa, Barat dan Jawa yang pernah dikemukakan Ong, maka, untuk saat ini, narasi Jawa lah yang dominan dalam situasi informal komunitas PMS. Penggunaan kalimat/kata bahasa Jawa yang kental dalam situasi informal mencerminkan narasi Jawa yang menjadi identitas dominan komunitas PMS dalam berbahasa di situasi informal sehari-hari.

Namun, selain bahasa Jawa, ada narasi lain yang jauh lebih dominan daripada ketiga narasi yang pernah disebut Ong. Narasi tersebut adalah narasi ke-Indonesia-an. Bahasa yang aslinya bahasa melayu pasar ini dipilih oleh Founding-Father untuk menjadi bahasa nasional sejak sumpah pemuda 1928 (Sneddon, 2003). Contoh-contoh penggunaan bahasa Indonesia terlihat dari “Mau ketemu siapa? (Narasumber 4, 2013)” yang merupakan sapaan informal dalam Bahasa Indonesia, atau pun “Ada yang bisa dibantu Pak? (Narasumber 5, 2013)” sapaan standar untuk orang yang ditugaskan di bidang pelayanan, dimana R5 adalah petugas keamanan PMS. Sedangkan dengan komunitas yang peneliti temui di sekitar lingkungan PMS ada contoh-contoh dimana penggunaan Bahasa Indonesia juga diselingi oleh Bahasa Jawa.

Penggunaan bahasa Indonesia umum mereka gunakan ketika bertemu dengan peneliti dengan sesekali diselingi bahasa Jawa, sebagai contoh, “Mau ketemu siapa Mas? (Narasumber 7, 2013).” Kalimat Mau ketemu siapa merupakan Bahasa Indonesia sedangkan kata mas adalah Bahasa Jawa untuk laki-laki muda. Ada pula contoh ketika peneliti menanyakan arah ke tukang kebun PMS, “keluar ke kanan, pertigaan kekanan lagi, nanti ketemu perempatan kekanan lagi, dah disitu kantor PMS Mas, Tanya mriko mawon mas ke satpamnya, Pak “R” ada enggak? (Narasumber 6, 2013).” Hampir seluruh kalimat didominasi Bahasa Indonesia, kecuali kata Mas, dan mriko mawon yang merupakan Bahasa Jawa untuk laki-laki muda dan disana saja (mriko mawon). Namun, ketika berbicara dengan rekan yang sudah akrab mereka cenderung menggunakan bahasa Jawa dalam pembicaraan mereka. Jelas sekali bahwa identitas yang mereka wujudkan/produksi secara simbolis (kultural) dalam pembicaraan sangat

didominasi oleh narasi kultur Indonesia dan Jawa.

Untuk narasi Jawa pada situasi informal, penetrasi ini lebih disebabkan oleh lingkungan sekitar yang didominasi oleh penutur bahasa Jawa (Narasumber 2, 2014). Maka, mau tak mau penutur PMS harus menyesuaikan agar bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar, walau dalam perkembangannya, bahasa Jawa menjadi bahasa yang lebih sering digunakan pada suasana informal, santai, dan akrab.

Bahasa Indonesia lebih dominan digunakan untuk suasana yang formal, serius dan dengan orang yang belum akrab. Apabila penggunaan bahasa Jawa lebih dikarenakan lingkungan yang didominasi penutur pengguna bahasa Jawa, maka penggunaan Bahasa Indonesia memiliki alur yang lebih kompleks untuk sampai tataran penggunaan yang luas seperti sekarang ini. Mengingat kelahiran Indonesia sebagai narasi nasional baru di abad ke 20 dan perluasan penggunaan secara besar-besaran baru di paruh kedua abad 20. Untuk perkembangan dan kemajuan pesat bahasa Indonesia akan dijelaskan menggunakan pengamatan Sneddon (2003).

Pemakaian Bahasa Mandarin juga semakin terdesak oleh perkembangan pesat pemakaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sementara itu, bahasa Indonesia semakin berkembang pesat persebaran penggunaannya (Sneddon, 2003).

Dengan tekanan seperti itu tidak heran Bahasa Mandarin tersisih dari keseharian simbolik komunitas Tionghoa. Tekanan negara dan perkembangan pesat dan luas penggunaan Bahasa Indonesia, serta lingkungan yang sehari-harinya berbahasa Jawa membuat simbol-simbol Bahasa Mandarin terdesak dari kehidupan publik.

Terlihat jelas bahwa narasi yang mendominasi Identitas Kultural komunitas PMS adalah narasi Indonesia dan Jawa. Narasi Jawa sebagaimana dikemukakan oleh Ong (2009), Narasumber 3 (2014) dan Narasumber 2 (2014) mempengaruhi identitas kultural komunitas PMS karena mereka hidup di tengah masyarakat yang menganut Budaya Jawa, termasuk bahasanya. Sedangkan Narasi Tionghoa yang masih dilihat Ong (2009) & Lan (2013) bisa dikatakan hampir tidak digunakan lagi dalam keseharian komunitas PMS. Sedangkan, perkembangan lain, yang jauh lebih menggairahkan perkembangan pembelajaran Bahasa Mandarin akhir-akhir ini adalah

membatkannya hubungan diplomatic dengan RRC semenjak era Habibie dan bangkitnya RRC sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia sehingga memiliki prestise sebagai calon superpower dunia (Jacques, 2009; Narasumber 3, 2014).

Menimbulkan kebanggaan apabila memiliki kaitan asal-usul kebangkitan calon superpower ini dan kemampuan yang berkaitan dengan RRC termasuk, salah satunya, kemampuan berbahasa Mandarin. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi merupakan bagian dari gejala yang terjadi di Asia Tenggara (Ang, 2001; Jacques, 2009).

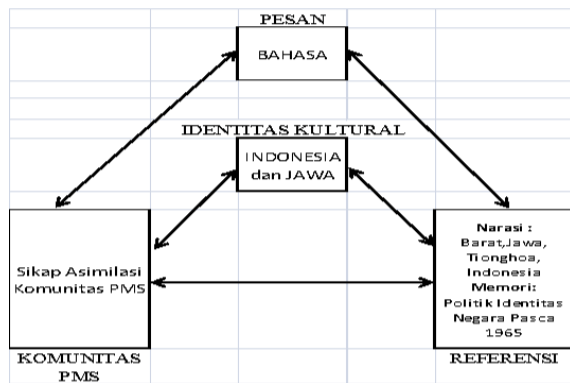
Walau pun begitu, narasi Barat/Global, hampir tidak tampak sama sekali selama penelitian ini berlangsung. Hal ini agak berbeda dengan pandangan komunitas PMS sendiri. Komunitas PMS cenderung cemas dengan globalisasi sebagaimana pandangan Narasumber 1 (2013), Narasumber 2 (2014) dan Narasumber 3 (2014).

Namun, apabila kita melihat dari sisi kosakata Bahasa Indonesia, bahasa yang mendominasi identitas kultural komunitas PMS saat ini, maka kekhawatiran komunitas PMS tampaknya beralasan. Walaupun tidak ada bahasa Inggris/Barat yang terdeteksi selama pengambilan data berlangsung, bukan berarti simbol-simbol Barat tidak berpengaruh sama sekali. Karena narasi yang dominan dalam kultur berbahasa komunitas PMS, yaitu Bahasa Indonesia kaya akan bahasa serapan dari negeri-negeri Barat (Lombard, 2005). Semisal, kusir, dasje (Lombard, 2005) atau yang kontemporer dan familiar saat ini seperti di-tweet, cek-in, browsing, di-gugel yang sebagian belum ada di kamus namun sudah familiar dalam keseharian (Narasumber 1, 2013). Tampaknya pengaruh narasi Barat terasa sangat subtil dan harus hati-hati disimpulkan.

Sejauh ini pengaruh subtil narasi Barat dalam kosakata berpadu dengan bahasa melayu pasar (sekarang-Bahasa Indonesia), bahasa daerah (Bahasa Jawa), dan negeri-negeri Timur lain (Lombard, 2005) yang pernah dikemukakan Lombard tampaknya terulang dalam penelitian ini.

Dari paparan diatas, mentalitas atau identitas kultural komunitas PMS dalam berbahasa terlihat kembali ke sumber-sumber Timur. Penggunaan bahasa komunitas PMS didominasi oleh narasi Indonesia (formal) dan Jawa (Informal). Di sisi lain, narasi Barat masuk meresap perlahan-lahan secara subtil dalam

khazanah kosakata berbahasa Indonesia. Sedangkan, bahasa Mandarin yang bangkit seiring dengan daya tarik, kembalinya kebanggaan nasional dan kemajuan ekonomi negeri Tiongkok menimbulkan kembali kebanggaan sebagai keturunan Tionghoa (Ang, 2001; Jacques, 2009). Sesuatu yang sempat ditutup-tutupi selama masa Orba. Sampai saat penelitian ini berlangsung ternyata masih belum banyak digunakan oleh komunitas PMS. Pemaparan hasil penelitian diatas dapat digambarkan dengan concept mapping sebagai berikut:



Gambar 1. Concept Mapping hasil penelitian

## Pembahasan

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa identitas kultural Indonesia-Tionghoa PMS dalam berbahasa sehari-hari adalah Indonesia-Jawa. Dalam situasi formal maka positioningnya (identitas) adalah Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam situasi santai/informal maka positioningnya adalah Bahasa Jawa. Meskipun bahasa yang dominan adalah Bahasa Indonesia, menariknya narasi Indonesia tidak ada dalam referensi budaya Tionghoa yang diulas oleh Ong (2009). Ong hanya mengungkapkan 3 (tiga) narasi yaitu: Barat, Jawa, dan Tionghoa. Narasi Indonesia tidak disebut oleh Ong walaupun ulasannya dibuat di tahun 1960-an, tahun dimana Bahasa Indonesia sudah umum digunakan di Pulau Jawa.

Ong (2009) dalam ulasannya mengenai 3 (tiga) referensi budaya hanya menyebutkan Budaya Jawa, Tionghoa dan Barat. Sedangkan, dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ada narasi lain yang mendominasi identitas budaya Indonesia-Tionghoa PMS, yaitu narasi Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya adalah Bahasa Melayu Rendah yang sudah lama digunakan di Nusantara untuk berkomunikasi antar suku-bangsa. Bahasa ini kemudian dijadikan Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Nasional oleh para pendiri Bangsa.

Lombard (2005) mengungkapkan bahwa mentalitas penduduk Pulau Jawa setelah

mengalami pembaratan terbelah menjadi dua. Sebagian menerima modernisasi, dan sebagian lagi kembali ke sumber-sumber Timur. Merujuk pada penelitian ini maka dalam hal berbahasa/komunikasi sehari-hari tampaknya sumber-sumber Timur mendominasi komunitas Tionghoa PMS. Sumber Timur tersebut adalah narasi Indonesia dan Jawa. Namun, pendapat Lombard bahwa pembaratan bisa dirasakan, salah satunya, melalui kosakata yang mengandung serapan simbol-simbol Barat patut dicermati. Karena, Bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan dari Bahasa negeri-negeri Barat.

Penelitian ini jika dikaitkan dengan pendapat Lan (1998 dalam Afif, 2012) dan Gungwu (2000) mengenai 4 (empat) pilihan identitas yang dapat dipilih oleh Diaspora Tionghoa, cenderung ke pilihan identitas atau sejarah lokal (Gungwu, 2000) atau mirip dengan itu mereka merasa telah berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia (Lan, 1998 dalam Afif 2012). Gungwu melihat pilihan ini sebenarnya sulit dilakukan oleh Diaspora Tionghoa. Namun untuk kasus Indonesia kejadian pasca 1965 tampaknya menjadi katalis bagi perubahan politik identitas asimilasi-diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia. Hal ini sejalan dengan sikap asimilasi PMS sejak tahun 1959 dan politik identitas pemerintah Orde-Baru sejak 1965 yang mengusung asimilasi-diskriminatif dalam melihat dan menangani permasalahan minoritas Tionghoa di Indonesia.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *positioning* kultural komunitas Tionghoa PMS dalam berbahasa sehari-hari adalah identitas Indonesia-Jawa, karena percakapan lebih didominasi oleh Bahasa Indonesia pada konteks formal dan Bahasa Jawa pada konteks informal. Bisa juga disimpulkan dengan kata-kata Lombard (2005), lebih cenderung kembali ke sumber-sumber Timur.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dilakukan penelitian identitas kultural atas simbol-simbol dari komunitas-komunitas lain agar didapatkan referensi yang memadai mengenai identitas kultural warga masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

## Daftar Pustaka

Afif, A. (2012). *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*. Depok: Kepik.

- Ang, I. (2001). *On Not Speaking Chinese: Living Between Asia and The West*. London: Routledge.
- Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research* (12 ed). Singapore: Wadsworth-CENGAGE.
- Barker, C. (2002). *Making Sense of Cultural Studies: Central Problem and Critical Debates*. London: Sage.
- Carey, J. W. (2009). *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. London: Routledge.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five Approaches*. London: Sage.
- Fiske, J. (2012) *Pengantar Ilmu Komunikasi* (3 ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York, Basic Books, Inc.
- Giddens, A. (1991). *Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Gondomono. (2013). *Manusia dan Kebudayaan Han*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Gungwu, W. (2000). *The Chinese Overseas: From Earthbound China to the Quest for Autonomy*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. Dalam Rutherford, J. (Peyunt.), *Identity: Community, Culture, Difference* (hal. 222-237). London: Lawrence & Wishart.
- Hecht, M. L., Jackson II, Ronald L., Ribeau, S. A. (2003). *African American Communication: Exploring Identity and Culture* (2 ed). London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Heryanto, A., & Mandal, S. K. (Eds.). (2003). *Challenging Authoritarianism In Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. London: Routledge Curzon.
- Heryanto, A. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. New York: Routledge.
- Heryanto, A. (2015). *Identitas Dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (E. Sasono, Penerj.). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hoon, C. Y. (2012). *Identitas Tionghoa Pasca Suharto: Budaya, Politik dan Media*. Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES.
- Jacques, M. (2009). *When China Rules The World: The Rise of The Middle Kingdom and The End of The Western World*. London: Allen Lane.
- Kuntowijoyo. (2000). The Making of a Modern Urban Ecology: Social and Economic History of Solo, 1900-1915. Dalam *Jurnal Lembaran Sejarah*. III (1), hal. 163-185.
- Lan, N. J. (2013). *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). *Theories of Human Communication* (9 ed). Singapore: Thomson-Wadsworth.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ong, H. (2009). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- PMS. (1982). *PMS: Peringatan 50 Tahun PMS*. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Rush, J. R. (2007). *Opium To Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia 1860-1910*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Rustopo. (2007). *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*. Yogyakarta: Nabil dan Ombak.
- Sneddon, J. (2003). *Indonesian Language: Its History and Role In Modern Society*. UNSW Press: Sydney.